

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

[illegible]

	(1). Nama Program dan Kegiatan	Jafung Perencana Ahli Muda	PPID Pelaksana Disporapar Tahun 2025	2025 Samarinda	https://disporapar.samarindakota.go.id/unduhandokumen-sakip	✓	✓			Memuat informasi mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah
	(2) Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta alamat dan/atau nomor telepon yang dapat dihubungi	Jafung Perencana Ahli Muda	PPID Pelaksana Disporapar Tahun 2025		https://disporapar.samarindakota.go.id/unduhandokumen-sakip	✓	✓			Memuat informasi mengenai penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta alamat dan/atau nomor telepon
	(3) Target dan atau Capaian Program dan Kegiatan	Jafung Perencana Ahli Muda	PPID Pelaksana Disporapar Tahun 2025		https://disporapar.samarindakota.go.id/unduhandokumen-sakip	✓	✓			Memuat informasi mengenai target dan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah (DPA)
	(4) Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jafung Perencana Ahli Muda	PPID Pelaksana Disporapar Tahun 2025		https://disporapar.samarindakota.go.id/unduhandokumen-sakip	✓	✓			Memuat informasi mengenai jadwal pelaksanaan program dan kegiatan utama Pemkot
	(5) Anggaran Program dan Kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	Jafung Perencana Ahli Muda	PPID Pelaksana Disporapar Tahun 2025		https://disporapar.samarindakota.go.id/unduhandokumen-sakip	✓	✓			Memuat informasi mengenai Anggaran Program dan Kegiatan (RKA dan DPA)
	(6). Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah (misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, proses pemberangkatan TKI, pembuatan RT/RW, dana BOS,	Jafung Perencana Ahli Muda	PPID Pelaksana Disporapar Tahun 2025		https://disporapar.samarindakota.go.id/unduhandokumen-sakip	✓	✓			Memuat informasi mengenai jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah
	(7). Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat. (yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat misalnya hak raskin, dana khusus bagi petani/peternak di daerah)	-----								Memuat informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
	(8). Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara	-----								Memuat informasi mengenai: (1). Pengumuman penerimaan pegawai di lingkungan Badan Publik (2). Pengumuman tata cara pendaftaran pegawai di lingkungan Badan Publik (3). Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai (4). Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya (5). Komponen dan standar nilai kelulusan pegawai (6). Daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar pegawai yang diterima (7). Hasil penilaian dari setiap tahapan

[illegible]

	(1). Daftar Rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan									Memuat informasi daftar dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan Pimpinan Perangkat Daerah Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Perangkat Daerah
	(2). Daftar Peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPID Pelaksana Disporapar Tahun 2025	2025 Samarinda	https://disporapar.samarindakota.go.id/unduh/peraturan-keputusan-kebijakan	✓	✓			Memuat informasi daftar peraturan perundang-undangan, keputusan Pimpinan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang telah disahkan/ditetapkan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Perangkat Daerah
7	Informasi Tata Cara Permohonan dan Keberatan Informasi Publik									
	(1). Tata Cara Permohonan Informasi Publik	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPID Pelaksana Disporapar Tahun 2025	2025 Samarinda	https://disporapar.samarindakota.go.id/sop	✓	✓			Memuat alur, syarat dan pengajuan permohonan
	(2). Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPID Pelaksana Disporapar Tahun 2025	2025 Samarinda	https://disporapar.samarindakota.go.id/sop	✓	✓			Memuat alur, syarat dan pengajuan keberatan informasi publik
8	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang									
	(1). Informasi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintah Kota Samarinda	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPID Pelaksana Disporapar Tahun 2025	2025 Samarinda	https://disporapar.samarindakota.go.id/pengumuman	✓	✓			Memuat informasi mengenai: 1) Alur/skema pengaduan (tata cara) 2) Form/lembar isian pengaduan 3) Kontak pengaduan
	(2). Informasi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pejabat Pemerintah Kota Samarinda	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPID Pelaksana Disporapar Tahun 2025		https://www.lapor.go.id/					Memuat informasi mengenai: 1) Alur/skema pengaduan (tata cara) 2) Form/lembar isian pengaduan 3) Kontak pengaduan
9	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa									
	s	Pengguna Anggaran /PA/Kepala OPD	PPID Pelaksana Disporapar Tahun 2025	2025 Samarinda	https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/p/enyedia/D241#	✓	✓			Memuat informasi mengenai daftar paket pelelangan yang terdiri dari: 1) Nama Kegiatan 2) Kode RUP 3) Nama Paket 4) Sumber Dana 5) Lokasi 6) Volume 7) Metode pengadaan 8) Nilai Pagu Anggaran.

	(2). Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	PA DAN PPKOM	PPID Pelaksana Disporapar Tahun 2025	2025 Samarinda	https://disporapar.samarindakota.go.id/pengumuman	✓	✓			Memuat informasi yang terdiri dari: 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS 3) Spesifikasi Teknis 4) Rancangan Kontrak 5) Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi 6) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 7) Daftar Kuantitas dan Harga 8) Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan 9) Gambar Rancangan Pekerjaan 10) Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis mengenai Dampak Lingkungan 11) Dokumen Penawaran Administratif
										17) Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia 18) Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 19) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 20) Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan 21) Surat Perintah Mulai Kerja 22) Surat Jaminan Pelaksanaan 23) Surat Jaminan Uang Muka 24) Surat Jaminan Pemeliharaan 25) Surat Tagihan 26) Surat Pesanan E-purchasing 27) Surat Perintah Membayar 28) Surat Perintah Pencairan Dana 29) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 30) Laporan Penyelesaian Pekerjaan 31) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 32) Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over
10	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik									
	(1). Pengamatan gejala bencana									Memuat informasi mengenai pengamatan gejala bencana (Diisi)
	(2). Analisis hasil pengamatan gejala bencana									Memuat informasi mengenai hasil analisis pengamatan gejala bencana
	(3). Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang									Memuat informasi mengenai pengamatan gejala bencana (Diisi)
	(4). Peringatan Bencana									Memuat informasi mengenai peringatan bencana
	(5). Pengambilan tindakan oleh masyarakat									Memuat informasi mengenai pengambilan tindakan oleh masyarakat (Diisi oleh BPBD)

	(6). Lokasi Evakuasi					✓	✓			Memuat informasi mengenai lokasi evakuasi saat keadaan darurat
	(7). Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi									Memuat informasi mengenai laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA										
1	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum									
	(1). Bencana alam									Memuat informasi mengenai bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik,
	(2) Keadaan bencana non-alam									Memuat informasi mengenai keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran
	(3). Bencana sosial									Memuat informasi mengenai bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok
	(4). Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular									Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular
	(5). Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat									Memuat informasi mengenai racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat (Diisi
	(6). Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik									Memuat informasi mengenai rencana gangguan terhadap utilitas publik
C. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT										
1	Daftar Informasi Publik									
	(1). Daftar Informasi Publik Perangkat Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPID Pelaksana Disporapar Tahun 2025	2025 Samarinda	https://disporapar.samarindakota.go.id/pengumuman	✓	✓			Berisi tentang informasi-informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta, setiap saat yang ada di Perangkat Daerah
2	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik									
	(1). Dokumen pendukung					✓	✓			Memuat informasi mengenai dokumen pendukung dalam
	(2). Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk					✓	✓			Memuat informasi masukan-masukan dari berbagai pihak (Diisi oleh
	(3). Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan,					✓	✓			Memuat informasi Risalah rapat (Diisi
	(4). Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk					✓	✓			Memuat informasi rancangan peraturan (Diisi oleh Sekretariat
	(5). Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk					✓	✓			Memuat informasi tahap perumusan peraturan (Diisi oleh Sekretariat DPRD)
	(6). Dokumen Keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan					✓	✓			Memuat informasi Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Perangkat Daerah
3	Informasi tentang organisasi, administrasi,									
	(1). Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan									Berisi tentang pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan (Diisi oleh Bagian Organisasi, BKPSDM, dan BPKAD)

	(2). Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan yang pernah diterima					✓	✓			Berisi tentang data profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan yang pernah diterima
	(3). Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangan					✓	✓			Memuat informasi berupa dokumen DPA, RKA, dan Laporan Keuangan
	(4). Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh badan publik					✓	✓			Dokumen yang memuat informasi data statistik yang dibuat dan dikelola
	(5). Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya					✓	✓			Memuat informasi mengenai dokumen surat perjanjian
	(6). Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya					✓	✓			Memuat Informasi berupa surat menyurat yang dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah
	(7). Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan					✓	✓			Memuat Informasi berupa Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan, dan laporan penataan izin yang diberikan (Diisi oleh DPMPTSP)
	(8). Data perbendaharaan atau inventaris					✓	✓			Menyajikan informasi mengenai data perbendaharaan/inventaris aset Perangkat Daerah
	(9). Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik					✓	✓			Memuat informasi tentang rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah
	(10). Agenda kerja pimpinan satuan kerja					✓	✓			Memuat informasi berupa agenda kerja pimpinan satuan kerja
	(11). Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya					✓	✓			Menyajikan Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, <u>anggaran</u>
	(12). Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakan									Memuat informasi berupa jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam
	(13). Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya									Memuat informasi berupa jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh
	(14). Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan									Memuat informasi mengenai daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan (Diisi oleh BAPPERIDA)
	(15). Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik									Berisi informasi publik lain yang dtelah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan (Diisi oleh Diskominfo)

	(16). Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja									Menyajikan informasi tentang standar pengumuman informasi (Diisi oleh Diskominfo)
	(17). Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.									Menyajikan informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
4	Informasi dan publikasi mengenai teknis Perangkat Daerah (Output per Bidang yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Tupoksi)									

Kepala Dinas,
